

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Dunn, William, N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang
- Hasanudin, Tubagus Maulana. Tesis. 2009. *Relasi Gender dalam Perspektif Akses dan Kontrol terhadap Sumber daya*. Institut Pertanian Bogor : Bogor
- Hubeis, Aida Vitalaya S. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press: Bogor
- Kadji, Yulianto.G. 1996. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Realita*. Cahaya abadi: Tulungagung
- Maryory Narua. 2011. *Tesis. Pengarusutamaan Gender pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku*. Universitas Hasanuddin : Makassar
- Mugniesyah, Siti Sugiah. 2007. "Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan" dalam *Ekologi Manusia*. Editor Soeryo Adiwibowo. Fakultas Ekologi Manusia Institut pertanian Bogor.
- Pandji Santoso, 2008. "Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance" Praktis. Pusat Penelitian UNS, Surakarta.
- RanyJuliani. 2011. "Persepsi pekerja tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan peraturan kerja di PT. ITS, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Riant Nugroho, 2008. "Gender dan Administrasi Publik (Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1989-2002)". Pustaka pelajar: Yogyakarta
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung

Supiandi, Yusuf. 2008. *Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: UNFPA.

Suryadi Ace, dkk, 2001. "*Analisis Gender Dalam Pembangunan Pendidikan*". BAPPENAS bekerjasama CIDA

Tidar Noffitri Linandar.2009. *Faktor-faktor yang mempengaruhi karier wanita (studi kasus badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana Kota Bogor)*. Fakultas ekonomi dan manajemen. IPB Bogor

Wayne Parson, 2006, "*Publik Policy, teori dan praktek analisis Kebijakan*". Kencana: Jakarta

Wibawa, S, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali press : Jakarta

### **Dokumen-dokumen**

UUD 1945

UU No. 20 tahun 2003

Intruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Departemen Dalam Negeri, 2003. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pesan Standar: Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2004. Pembangunan Kapasitas Kelembagaan: Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2005. Panduandan Bunga Rampai: Panduan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI.BKKBN.UNFPA

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2006. Materi Rujukan Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan,

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). “petunjuk teknis pengajauan dan pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas pokja PUG bidang pendidikan provinsi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2000. Panduan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2013

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan

Modul apa dan bagaimana pengarusutamaan gender bidang pendidikan 2006. Dinas Pendidikan Provinsi SulSel

Hasil Evaluasi Tim Evaluator Independen (Tim Ahli Gender 9 Sektor), mengambil langkah untuk melakukan evaluasi proses pelaksanaan PUG di 9 sektor pembangunan yang telah memiliki kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender. Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP)

Materi dalam workshop PPRG oleh badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana provinsi Sulawesi Selatan, di ruang rapat lantai 4 BAPPEDA Sul-Sel, tgl 8-9 Mei 2012 oleh Dr. Since Erna Lamba.

Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2012

Makalah seminar “Pengarusutamaan Gender (Pug) Bidang Pendidikan dalam penyongsong Era Globalisasi” oleh Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc. disampaikan pada Loka Karya Pengarusutamaan Gender dalam pengelolaan Sumber daya lingkungan menuju kualitas kehidupan berkelanjutan Kampus IPB Dermaga 10- September 2007.

BPS, K PP &PA 2011 dalam workshop PPRG oleh badan pemberdayaan perempuan keluarga berencana Provinsi Sul-Sel, di ruang Rapat lantai 4 BAPPEDA Sul-Sel, tgl 8-9 Mey 2012

Statistik gender 2011 BPPKB Prov. Sul-Sel

LAN dan BPKB, 2005. "Perncanaan Staratgik Instansi Pemerintah (Modul 2 dan 5 Sosialisasi sistem akuntabilitas Kinerja instnsi Pemeritah).

Makalah seminar kebijakan pemerintah tentang pengembangan pendidikan berbasis kesetaraan dan keadilan gender. Prof. Ismi Dwi Astuti Nurhaety di STAIN Malang